



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-NYA sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah akhir Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini, merupakan pencapaian penyelenggaraan pemerintah fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi daerah

Akhirnya Kami berharap, laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik di masa datang dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ Tahun 2025 ini, Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat yang diberikan guna terwujudnya cita-cita masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Januari 2026
KEPALA BAPPERIDA


Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB.I. Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	8
BAB.II. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	11
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	11
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	11
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	42
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	43
2.1.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	45
2.1.5. Inovasi.....	69
2.1.6. Prestasi / Penghargaan.....	70
2.2. Kebijakan daerah	70
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023	71
BAB.III. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan	72
2.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang dilaksanakan	72
2.2. Hambatan – Hambatan	72
BAB.IV. Penutup	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025	8
Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025.....	9
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2025.....	10
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
Tabel 2.2. Capaian IKU Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025.....	43
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025.....	44
Tabel 2.4. Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025	46
Tabel 2.5. Croscutting Sasaran Program	47
Tabel 2.6. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025....	52
Tabel 2.7. Analsis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan	68
Tabel 2.8. Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan Selayar	4
Gambar 2.1. Tampilan Website selayar.emonev	69

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Laporan ini merupakan penjabaran hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang penyusunannya berlandaskan pada kerangka hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.

Secara operasional, capaian kinerja yang dilaporkan mengacu pada kebijakan dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 beserta perubahannya dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025. Dengan demikian, laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun anggaran 2025.

1.1. Gambaran Umum OPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Organisasi Perangkat Daerah bertipe A yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satunya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Kode Pos 92812, website : <https://Bapperida.kepulauanselayarkab.go.id/> Email : bappedaselayar@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

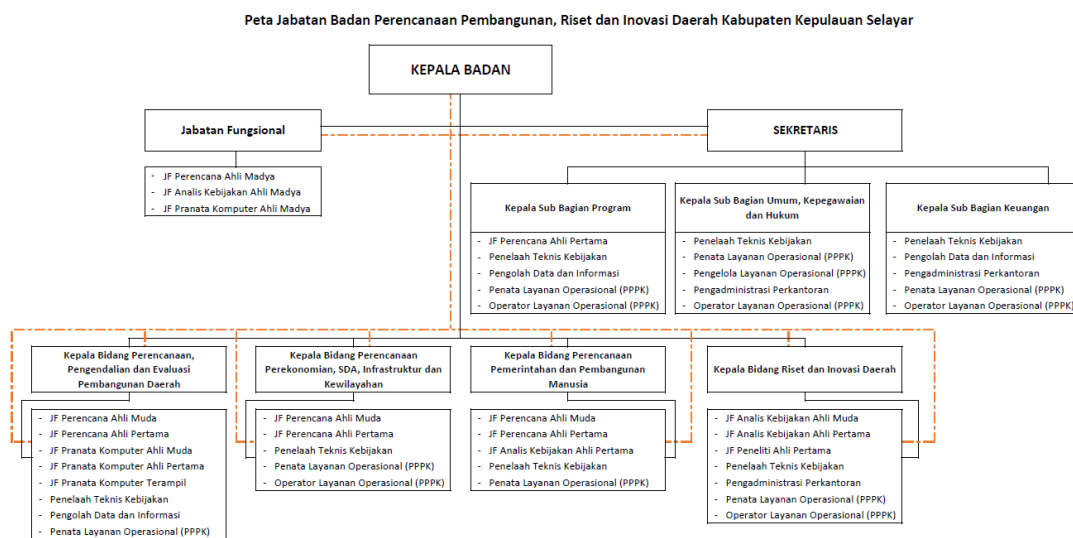
Susunan organisasi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Analis Kebijakan;
 - b. Perencana Ahli; dan
 - c. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bapperida digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan Selayar



Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 44 Tahun 2024

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bapperida, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan

rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi di daerah serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;

- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang riset dan inovasi Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bapperida Kepulauan Selayar per Desember 2025 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 31 orang, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar adalah sebanyak 60 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. 1.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	25	86,21%	41,67%	23	77,42%	40%
1	S3	2	6,90%	3,33%			
2	S2	10	34,48%	16,67%			
3	S1	13	44,83%	21,67%	23	74,19%	38,33%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1	3,23%	1,67%
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,79%	6,67%	7	22,58%	11,67%
1	SMA	4	13,79%	6,67%	6	19,35%	10%
2	SMP				1	3,23%	1,67%
Jumlah		30			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		60					

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 29 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 9 pegawai (31%), golongan III sebanyak 18 pegawai (62%), dan golongan II sebanyak 2 pegawai (7%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. 1.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	9	31%
	IV/c	1	3%
	IV/a	8	31%
2.	Golongan III	18	62%
	III / d	8	28%
	III / c	3	10%
	III / b	4	14%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	7%
	II / d	0	0%
	II / c	2	7%
	II / b	0	0%
	Jumlah	29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 29 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3,45%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (17,24%) yang menduduki eselon III, 2 pegawai (6,90%) yang menduduki eselon IV, 10 pegawai (34,48%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 11 pegawai (37,93%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3.
Jumlah Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,45%
2	Eselon III	5	17,24%
3	Eselon IV	2	6,90%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	10	34,48%
5	Jabatan Fungsional Umum	11	37,93%
	Jumlah	29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 4 (Empat) Program yaitu 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 4) Program Riset dan Inovasi Daerah, yang terurai dalam 8 (delapan) kegiatan penunjang, 6 (enam) kegiatan bidang urusan perencanaan, serta 2 (dua) kegiatan bidang urusan riset dan inovasi.

Capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan 96,32% atau Rp. 5.814.150.634 (Lima Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dari total pagu Rp. 6.036.201.400 (Enam Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), beberapa kegiatan merupakan amanah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, capaian kinerja sebagaimana tersebut, disajikan pada tabel 2.1 :

Tabel. 2.1
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Penunjang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
					4.792.111.200	4.606.497.250			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
					15.911.600	13.337.572			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
					3.343.600	2.972.250			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.454.800	1.341.399			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.454.800	1.341.285			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.689.600	1.592.872			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					1.689.600	1.613.985			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			
					3.562.400	3.306.336			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
	2.716.800	1.169.445							
	100%	100%							
	3.411.008.300	3.257.608.901							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	31 Orang							
	3.391.999.300	3.240.185.191							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen							
	11.407.600	10.445.759							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan							
	4.999.800	4.571.984							
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen							
	2.601.600	2.405.967							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
					5.208.700	4.925.644			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
					2.530.300	2.385.567			
				Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
					2.678.400	2.540.077			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
					50.620.000	46.297.800			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	40 Paket			
					30.500.000	27.084.000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	1 Orang			
					20.120.000	19.213.800			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					561.155.200	560.275.838			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket			
					21.436.200	21.435.747			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
					13.945.000	13.120.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	199 Laporan			
					471.174.000	471.120.091			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					54.600.000	54.600.000			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					119.858.100	102.069.349			
				Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit			
					9.266.000	8.880.000			
				Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit			
					66.500.000	65.999.999			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit			
					44.092.100	27.189.350			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
					286.844.300	282.810.012			
					1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	27.872.000	26.834.994			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan 258.972.300	1 Laporan 255.975.018			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 341.505.000	100% 339.172.134			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit 172.370.000	17 Unit 170.102.874			
				Pemeliharaan Mebel	3 Unit 2.960.000	3 Unit 2.952.400			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit 12.210.000	12 Unit 12.210.000			
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit 4.000.000	1 Unit 3.969.360			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit 138.985.000	1 Unit 138.982.500			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit 10.980.000	14 Unit 10.955.000			
				2	Urusan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	RPJMD 2021-2026	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100% 532.929.600
Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100% 324.332.900	100% 310.401.847						
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen 18.779.900	2 Dokumen 16.411.090						
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 Dokumen 20.181.000	2 Dokumen 19.464.852						
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara 7.271.700	2 Berita Acara 5.375.808						
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara 25.571.100	2 Berita Acara 23.587.430						
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	440 Usulan 6.615.000	440 Usulan 6.049.732						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen 245.914.200	3 Dokumen 239.512.935			
			Inspektorat Propinsi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 21.786.900	100% 20.426.911			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen 7.612.500	1 Dokumen 6.751.299			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	28 Orang 1 Sistem 5.956.200	28 Orang 1 Sistem 5.478.818			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku 8.218.200	1 Buku 8.196.794			
			RPJMD 2021-2026	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 186.809.800	100% 185.826.005			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan 9.128.400	2 Laporan 8.714.246			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan 177.681.400	4 Laporan 177.111.759			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80% 357.195.100	100% 341.732.368			
			RPJMD 2021-2026	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	100% 170.510.500	100% 163.976.766			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen 15.000.000	11 Dokumen 14.135.310			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan 0	11 Laporan 0			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan 15.287.700	11 Laporan 14.526.321			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan 15.034.000	1 Laporan 13.258.869			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen 419.700	5 Dokumen 366.108			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan 10.000.000	5 Laporan 9.343.933			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan 45.492.000	5 Laporan 45.011.431			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan 69.277.100	1 Laporan 67.334.794			
			RPJMD 2021-2026	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100% 68.329.300	100% 62.046.322			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen 5.328.000	4 Dokumen 5.088.272			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan 3.565.200	4 Laporan 632.800			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan 14.868.000	4 Laporan 14.545.400			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perekonomian	1 Laporan 7.297.300	1 Laporan 6.029.150			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen 4.932.400	3 Dokumen 4.808.300			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan 2.370.000	3 Laporan 2.369.700			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan 24.721.700	3 Laporan 23.521.700			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan 5.246.700	1 Laporan 5.051.000			
			RPJMD 2021-2026	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100% 118.355.300	100% 115.709.280			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen 6.000.000	4 Dokumen 5.861.613			
					4 Laporan	4 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.843.500	3.631.100			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35.817.000	35.766.369			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	12.911.000	12.911.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Dokumen	11 Dokumen			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.458.000	4.054.730			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	11 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.591.000	3.464.805			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	11 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	45.099.800	44.793.597			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan			
					5.635.000	5.226.066			
3	Fungsi Penunjang Urusan Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah		Program Riset dan Inovasi Daerah	100%	100%			
					353.965.500	349.266.253			
			RPJMD 2021-2026	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	100 %	100 %			
					346.000.200	343.044.287			
				Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	1 Naskah	1 Naskah			
					153.339.100	152.946.993			
				Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	1 Laporan	1 Laporan			
					38.361.100	35.916.466			
				Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
					154.300.000	154.180.828			
			RPJMD 2021-2026	Invensi dan Inovasi	100 %	100 %			
					7.965.300	6.221.966			
				Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Daerah	1 Laporan	0			
					0	0			
				Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	1 Laporan	0			
					0	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	1 Laporan 7.965.300	1 Laporan 6.221.966			

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, indikator capaian kinerja kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Bapperida yang tersusun dengan jumlah anggaran Rp.3.343.600,- terealisasi sebesar Rp.2.972.250,- dan hasilnya adalah 3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, diantaranya Dokumen Renja Bapperida Tahun 2026, Dokumen Perubahan Renja Bapperida Tahun 2025, dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bapperida 2025-2029;

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.454.800,- terealisasi sebesar Rp.1.341.399,- dan hasilnya Dokumen RKA Bapperida Tahun 2026;

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.454.800,- terealisasi

- sebesar Rp.1.341.285,- dan hasilnya adalah Dokumen Perubahan RKA Bapperida tahun 2025;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan dengan jumlah anggaran Rp.1.689.600,- terealisasi sebesar Rp.1.592.872,- dan hasilnya adalah Dokumen DPA Bapperida Tahun 2025;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.689.600,- terealisasi sebesar Rp.1.613.985,- dan hasilnya adalah Dokumen Perubahan DPA Bapperida Tahun 2025;
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.562.400,- terealisasi sebesar Rp.3.306.336,- dan hasilnya adalah 3 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, diantaranya Laporan Akuntabilitas Pemerintahan (Lakip) Bapperida Tahun 2024, Laporan LKPJ Bapperida Tahun 2024, dan Laporan LPPD Bapperida Tahun 2024;
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.2.716.800,- terealisasi sebesar

Rp.1.169.445,- dan hasilnya adalah Laporan Evaluasi kinerja Per Triwulan Bapperida Tahun 2025.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran Rp.3.391.999.300,- terealisasi sebesar Rp.3.240.185.191, dan keluarannya 31 Orang ASN terbayarkan gaji dan tunjangannya hingga 14 kali;

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp.11.407.600,- terealisasi sebesar Rp.10.445.759,- dan keluarannya 24 Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Bapperida;

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran Rp.4.999.800,- terealisasi sebesar Rp.4.571.984,- dan keluarannya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;

d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan jumlah anggaran Rp.2.601.600,- terealisasi sebesar Rp.2.405.967,- dan keluarannya Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan keuangan Bapperida oleh ITDA dan BPKP.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.2.530.300,- terealisasi sebesar Rp.2.385.567,- dan keluarannya Laporan Asset Bapperida Per Triwulan Tahun 2025;

b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.2.678.400,- terealisasi sebesar Rp.2.540.077,- dan keluarannya Laporan rekonsiliasi asset Bapperida Per Semester Tahun 2025.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi

sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan jumlah anggaran Rp.30.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.084.000,- dan keluarannya sebanyak 40 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah anggaran Rp.20.120.000,- terealisasi sebesar Rp.19.213.800,- dan keluarannya sebanyak 1 ASN mengikuti Pelatihan Teknis;

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang diselenggarakan Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.21.436.200,- terealisasi sebesar Rp.21.435.747,- dan keluarannya 12 Paket Barang Cetak dan Penggandaan;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator capaian kinerja adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.13.945.000,- terealisasi sebesar Rp.13.120.000,- dan keluarannya 12 Dokumen Bahan Bacaan;

- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran Rp.471.174.000,- terealisasi sebesar Rp.471.120.091,- dan keluarannya 199 Laporan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah terdiri dari 19 Laporan (Januari-Maret), 39 Laporan (April-Juni), 87 Laporan (Juli-September), dan 54 Laporan (Oktober-Desember).

- d. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.54.600.000,- terealisasi sebesar Rp.54.600.000,- dan keluarannya 1 Dokumen Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Unit Mebel yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.9.266.000,- terealisasi sebesar Rp.8.880.000,- dan keluarannya tersedianya 2 Unit Mebel;

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.66.500.000,- terealisasi sebesar Rp.65.999.999,- dan keluarannya tersedianya Peralatan Personal Computer berupa Laptop sebanyak 4 (empat) Unit.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.27.872.000,- terealisasi sebesar Rp.26.834.994,- dan keluarannya tersedianya Laporan Penyediaan Jaringan Internet dan Sumber Daya Air;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.258.972.300,- terealisasi sebesar Rp.255.975.018,- dan keluarannya tersedianya honorarium PTT,

Honorarium Supir dan Honorarium Petugas Kebersihan,
Pembayaran BPJS Tenaga Kerja dan penyediaan ATK.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan jumlah anggaran Rp.172.370.000,- terealisasi sebesar Rp.170.102.874,- dan keluarannya 17 Unit yang terbayarkan Pajak dan 17 Unit yang terpelihara;

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Mebel yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.2.960.000,- terealisasi sebesar Rp.2.952.400,- dan keluarannya 3 Unit Mebel yang diperbaiki;

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.12.210.000,- terealisasi sebesar Rp.12.210.000,- dan keluarannya 12 Unit peralatan kantor yang dipelihara;

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Aset Tak Berwujud (website) yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.4.000.000,- terealisasi sebesar

Rp.3.969.360,- dan keluaran tersedianya biaya perpanjangan biaya hosting website Bapperida.

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan jumlah anggaran Rp.138.985.000,- terealisasi sebesar Rp.138.982.500,- dengan keluaran kantor Bapperida yang dipelihara;

- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan jumlah anggaran Rp.10.980.000,- terealisasi sebesar Rp.10.955.000,- dan keluarannya 14 Unit sarana prasarana Gedung kantor yang dirawat, seperti pendingin ruangan, televisi, kulkas dan lainnya.

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) dengan jumlah anggaran Rp.18.779.900,- terealisasi

sebesar Rp.16.411.090,- dan keluarannya 2 Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) diantaranya RPJMD Tahun 2025-2029, dan Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD Tahun 2026;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah dengan jumlah anggaran Rp.20.181.000,- terealisasi sebesar Rp.19.464.852,- dan keluarannya 2 Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik), diantaranya Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik) RPJMD Tahun 2025-2029, dan Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD Tahun 2026;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dengan dengan jumlah anggaran Rp.7.271.700,- terealisasi sebesar Rp.5.375.808,- dan keluarannya 2 Berita Acara hasil konsultasi publik diantaranya Berita Acara hasil konsultasi publik dokumen Rancangan Awal dan Berita acara hasil konsultasi publik dokumen RKPD Tahun 2026;

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp.25.571.100,- terealisasi sebesar Rp.23.587.430,- dan keluarannya 2 Berita Acara yaitu Berita Acara Musrenbang RPJPD dan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2026;

- e. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp.6.615.000,- terealisasi sebesar Rp.6.049.732,- dan keluarannya 440 Usulan hasil musrenbang kecamatan yang terverifikasi;

- f. Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.245.914.200,- terealisasi sebesar Rp.239.512.935,- dan keluarannya 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan diantaranya Dokumen RPJMD 2025-2029, Dokumen RKPD Tahun 2026 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan jumlah anggaran Rp.7.612.500,- terealisasi sebesar Rp.6.751.299,- dan keluarannya Dokumen Hasil Analisis

Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Target 1 Orang Per OPD dengan jumlah anggaran Rp.5.956.200,- terealisasi sebesar Rp.5.478.818,- dan keluarannya 28 Orang (28 OPD);

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan dengan jumlah anggaran Rp.8.218.200,- terealisasi sebesar Rp.8.196.794,- dan Keluaran Buku profil Pembangunan Daerah Tahun 2024, sub kegiatan tersebut juga merupakan hasil rekomendasi reviu kinerja oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp.9.128.400,- terealisasi sebesar Rp.8.714.246,- dan keluarannya 2 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan

dan Pelaksanaan Pembangunan (Monev RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025);

- b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.177.681.400,- terealisasi sebesar Rp.177.111.759,- dan Keluarannya Laporan Triwulan hasil evaluasi pelaksanaan APBD dan Tugas Pembantuan Tahun 2025.

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 95% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.135.310,- atau sebesar 94,23%, dengan keluaran 11 Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tidak tercapai karena tidak ada anggaran;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan jumlah anggaran Rp.15.287.700,- terealisasi sebesar Rp.14.526.321,- atau sebesar 95% dengan keluaran 11 Laporan Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Pemerintahan;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dengan jumlah anggaran Rp.15.034.000,- terealisasi sebesar Rp.13.258.869,- atau sebesar 88,2% dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat;

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.419.700,- terealisasi sebesar Rp.366.108,- atau sebesar 87,23% dengan keluaran 5 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.343.9330,- atau sebesar 93,44% dengan keluaran 5 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.45.492.000,- terealisasi sebesar Rp.45.011.431,- atau sebesar 98,94% dengan keluaran 5 Laporan Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Pembangunan Manusia;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.69.277.100,- terealisasi sebesar Rp.67.334.794,- dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 95% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.5.328.000,- terealisasi sebesar Rp.5.088.272,- dengan keluarannya 4 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian yang difasilitasi penyusunannya;

b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.3.565.200,-

teralisasi sebesar Rp.632.800,- dengan Keluaran 4 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.14.868.000,- teralisasi sebesar Rp.14.545.400,- dengan Keluaran 4 Laporan Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Perekonomian.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.7.297.300,- teralisasi sebesar Rp.6.029.150,- dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat;

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.4.932.400,-

teralisasi sebesar Rp.4.808.300,- dengan Keluaran 3 Dokumen Perencanaan OPD Bidang SDA yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan jumlah anggaran Rp.2.370.000,- terealisasi sebesar Rp.2.369.700,- dengan Keluaran 3 Laporan Organisasi Perangkat Daerah Bidang SDA yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan jumlah anggaran Rp.24.721.700,- terealisasi sebesar Rp.23.521.700,- dengan keluaran 3 Laporan Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang SDA;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA dengan jumlah anggaran Rp.5.246.700,- terealisasi sebesar Rp.5.051.000,- dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah. Indikator capaian kegiatan adalah Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 95% dan realisasi sebesar 100%. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.861.613,- dengan Keluaran 4 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Infrastruktur yang difasilitasi penyusunannya;

b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.3.843.500,- terealisasi sebesar Rp.3.631.100,- dengan Keluaran 4 Laporan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.35.817.000,- terealisasi sebesar Rp.35.766.369,- dengan Keluaran 4 Laporan Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Insfrastruktur;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.12.911.000,- terealisasi sebesar Rp.12.911.000,- dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat;

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan jumlah anggaran Rp.5.458.000,- terealisasi sebesar Rp.4.054.730,- dengan Keluaran 11 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Kewilayahan yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.3.591.000,- terealisasi sebesar Rp.3.464.805,- dengan Keluaran 11 Laporan Organisasi Perangkat Daerah bidang kewilayahan yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.45.099.800,- terealisasi sebesar Rp.44.793.597,- dengan Keluaran 11 Laporan Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Kewilayahan;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.5.635.000,- terealisasi sebesar Rp.5.226.066,- dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat;

➤ **Program Riset dan Inovasi Daerah**

1. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset dengan jumlah anggaran Rp.153.339.100,- terealisasi sebesar Rp.152.946.993,- atau sebesar 99,74% dengan keluaran 1 Naskah Kebijakan;
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dengan jumlah anggaran Rp.38.361.100,- terealisasi sebesar Rp.35.916.466,- atau sebesar 93,63% dengan keluaran 1 Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Laporan fasilitasi tersebut memuat diantaranya :
 - a. Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Amanat RPJMD);
 - b. Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial (Amanat RPJDM);
 - c. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
 - d. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
 - e. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

- f. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2024;
- g. Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dengan jumlah anggaran Rp.154.300.000,- terealisasi sebesar Rp.154.180.828,- atau sebesar 99,92% dengan keluaran 1 Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025.

- 2. Kegiatan Inovasi dan Inovasi. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase penerapan Inovasi dan Inovasi dengan Target kinerja Renstra Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Kluster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah tidak tercapai karena tidak ada anggaran.

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) tidak tercapai karena tidak ada anggaran;

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi dengan jumlah anggaran Rp.7.965.300,- terealisasi sebesar Rp.6.221.966,- atau sebesar 78,11% dengan keluaran 1 Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi. Laporan fasilitasi tersebut memuat diantaranya :

- a. Penginputan Indeks Inovasi Daerah;
- b. Penyusunan Dokumen Realisasi Indikator Kinerja Kunci;
- c. Penyusunan Dokumen Inovasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah;
- d. Penyusunan Policy Brief;
- e. Fasilitasi Kerjasama Budidaya Teripang dan Perlindungan Lamun yang kerja sama dengan Universitas Nasional;
- f. Survei Produk Unggulan Daerah.

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kepulauan Selayar Nomor : 100.3.6/12.a/II/2025 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pengukuran atas Indikator

Kinerja Utama Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian IKU Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan Pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten, serta berorientasi hasil	Persentase program prioritas Pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas Pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	%	95	100	105,26
3	Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar tahun 2025

Dari tabel di atas, Bapperida memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bapperida Kepulauan Selayar dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 101.75%.

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan 2 Fungsi Utama yakni: 1) Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan, dan 2) Fungsi Penunjang Urusan Riset dan Inovasi. Adapun tujuan, sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kode
1.	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan Pembangunan daerah yang		Persentase program prioritas Pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas Pembangunan daerah	%	100	100	100	
2.	akuntabel, inovatif, persisten, serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	%	95	100	105	
3.		Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	
4.	Mewujudkan reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	BB	N/A	N/A	
	Perangkat Daerah	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB (70.10)	BB (72.95)	104.07	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (76.61)	B (83.35)	108.8	
5.			Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Opini	Sesuai	N/A	N/A	

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar tahun 2025
* Data Capaian Tahun 2024

Tabel 2.3 di atas menunjukkan realisasi capaian kinerja bidang urusan Perencanaan dan Riset dan Inovasi dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, adapun hasil realisasi 1 kinerja tujuan dan 1 kinerja sasaran pada urusan penunjang, sampai dengan saat ini, belum dapat disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2025, disebabkan pelaksanaan penilaian belum dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan.

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen turunannya, saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, tujuannya agar 1).efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dalam pencapaian target pembangunan meningkat, 2).tumpang tindih kebijakan atau program antar perangkat daerah dapat dihindari, sehingga pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. 3).perencanaan yang berbasis data dan bukti untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, dihitung dengan membandingkan jumlah program nasional yang diadopsi oleh daerah dengan jumlah total program prioritas nasional. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Indikator ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Penguatan Fiskal Daerah	15 Program	
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Penguatan Pendidikan Gratis PAUD-PT	4 Program	
		Program Kesetaraan Gender, PPA, dan Penyandang Disabilitas	3 Program	
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Program Pelayanan Kesehatan Gratis dengan BPJS	1 Program	
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Pemerataan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan UMKM	3 Program	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Proram Hilirisasi Sumber Daya Alam Berbasis UMKM	9 Program	
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Hulusasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Potensi Unggulan Lokal	3 Program	
		Program Pengentasan Kemiskinan	7 Program	
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Bebas RTLH		
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Daerah	3 Program	
		Program Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pembauran Kebangsaan	3 Program	
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Kemandirian Pangan	9 Program	
	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Hulusasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Potensi Unggulan Lokal		

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Program Membangun Desa, Menata Kota	5 Program	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Program Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Program	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Program	
J U M L A H			76 Program	

Sumber : RKPDP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025

Indikator Kinerja sasaran (intermediate outcome) satu didukung dengan 2 (dua) Program (indikator outcome), yakni 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 2.5
Crosscutting Sasaran Program

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Program	Indikator	Target	Capaian
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	95	100
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	95	100

Penjelasan Capaian Indikator Program (Outcome)

- **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP, Indikator ini menunjukkan seberapa baik program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Persentase konsistensi penjabaran program dalam RKPD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerjemahkan RPJMD dengan baik dan konsisten.

1. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, terdapat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) program perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat 288 (dua ratus puluh sembilan) program pernyataan tersebut dapat dilihat pada pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 57;

2. Kesesuaian program RKPD dan APBD.

Dari 209 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2025, terdapat 6 atau 2,87 persen program dengan capaian tinggi, sebanyak 25 program atau 11,96 persen dengan capaian sedang, dan sebanyak 178 program atau 85,17 persen dengan capaian rendah;

3. Kesesuaian program RPJMD dan APBD.

Dari 288 program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, hanya 209 program yang di anggarkan pada APBD Tahun 2025, terdapat 79 program yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja program ini, diantaranya adalah:

1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik Dokumen RKPD Tahun 2025;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2025;
4. Verifikasi Usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025;
5. Rapat Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2025) pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi-Selatan;
7. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Tahun 2026;
8. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025;
9. Pendampingan pelaksanaan e-planning (proses perencanaan dan penganggaran dan pelaporan) melalui aplikasi terpusat yang disediakan kemendagri yakni SIPD;
10. Penyusunan Buku Profil Pembangunan Tahun 2024;

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pengendalian pembangunan berbasis web (e-manca).

➤ **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, indikator ini mengukur sejauh mana program prioritas yang diterapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, maka semakin baik program prioritas perangkat daerah mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja program prioritas perangkat daerah dan memastikan bahwa program pembangunan daerah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Perumusan program prioritas tahun 2025 mengacu pada tema pembangunan RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;

serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD tahun 2025 halaman 116 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan melalui penerapan nilai budaya dan kearifan lokal								
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	90,02	100	56.965.140.206	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	110,97	100		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	94,44	100		
		2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	Persen	40,74	45,50	536.000.000	Dinsos
		3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	1.939.000.000	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	40,54	25,92		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		4	Program penanganan bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	200.500.000	Dinsos
		5	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	98	100	638.393.864	DPKP
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	100		
		6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Persen	51,47	54,55	154.423.000	Distan KP
		7	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69,42	80,35	5.293.788.200	DP3AP2KB
		8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	36/1000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	6.821.500.000	Dinkes
		9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	78,34	100	113.873.679.800	Dinkes
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	75,88	100		
				Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,41	100		
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	64,37	100		
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	85,90	100		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
			Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100		
			Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	60,65	100		
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	70,85	100		
			Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama	Utama		
2	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	68,42	100	582,295.300	Disdag KUKM
		2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persen	100	100	10.496.200	Disdag KUKM
3	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	100	100	90.000.000	Kesbangpol
		2	Program pengembangan kebudayaan	Persen	0	100	250.000.000	Disparbud

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	0	357.118.650	Semua Kecamatan
4	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0,39	1	258.923.500	Semua Kecamatan
		2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	100	100	90.000.000	Kesbangpol
5	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pembinaan perpustakaan	Angka	4,50	4,60	317.318.200	DPK
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Medali	67	70	7.195.000.000	Disdikpora
		3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	30,19	20,00	200.000.000	Dinkes
2	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif							
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persen	100	100	452.719.050	Diskominfo SP
		2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	2.561.500.000	Setda
				Persen	99,27	100		
		3	Program kepegawaian daerah	Persen	82,16	99,80	772.049.800	BKPSDM
				Persen	99,78	100		
4	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Menit	19,09	10	169.102.700	Semua Kecamatan		
5	Program perencanaan, pengendalian dan	Persen	100	95	1.000.000.000	Bapperida		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
			evaluasi pembangunan daerah						
		6	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,002	3+	4.084.144.341	Inspektorat Daerah
		7	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,68	4,50	135.365.873.000	BPKPD
		8	Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	99,27	100	91.540.000	Disdukcapil
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	54,08	37		
		9	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	95,00	100	828.028.300	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100		
		10	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,90	0,27	359.999.550	DP3AP2KB
		11	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	100	100	667.796.650	Diskominfo SP
		12	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	100	95	700.000.000	Bapperida
		13	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	903.000.000	Bapperida
		14	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	10.327.753.600	Setwan
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100	100	441.000.000	DisPMD
3	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan								
1		1		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	57,26	74,09	39.194.698.116	DisPUTR

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	0	90			
			Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	96,25	99,50			
		2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Persen	100	100	1.416.542.500	Distan KP
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	95	10.054.378.887	DisPUTR
				Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	50		
				Persentase Luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	3,91	1,98		
		2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	76	100	5.000.000.000	DisPUTR
		3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	4.600.000.000	DisPUTR
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	1,03	8,27	3.020.000.000	DPKP		
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Persen	44,07	70,50	670.000.000	Dishub
		2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Persen	37,92	30,92	295.000.000	Dishub
4	Peningkatan ekonomi desa								

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
1	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	2,63	3,42	617.114.000	Disperin TK
		2	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	27,55	39,69	206.622.100	Disperin TK
		3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Persen	55,00	100	700.037.100	Disdag KUKM
		4	Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	17,14	29,82	36.462.000	Distan KP
		5	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	6,32	5,27	1.115.575.983	DPKP
		6	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)				881.500.000	DP3AP2KB
			BKB	Persen	29,18	0,74			
	BKR	Persen	2,71	0,61					
	BKL	Persen	40,01	0,62					
	PIK R	Persen	73,03	0,51					
	UPPKS	Persen	43,19	0,91					
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Persen	33,33	33,33	470.000.000	DisPMD
		2	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	8,6	3,46	30.000.000	DisPMD
		3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	99,00	100	7.987.652.026	Semua Kecamatan
5	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah								
1	Meningkatnya usaha perikanan	1	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	1,878	32	130.000.000	DPMPSTP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.962,90	27.519,34	780.962.800	Disper
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	468,44	1.230,39	419.267.800	Disper
		4	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	99,98	100	1.293.635.400	Setda
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	244,91	249,84	1.579.635.400	Disper
		6	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Persen	0	60	52.481.000	Disperin TK
2	Meningkatnya usaha pariwisata	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	3,39	8	400.000.000	Disparbud
		2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-16,41	5	735.000.000	Disparbud
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar			Persen	-22,85	10			
	Tingkat huniaan akomodasi			Persen	4,20	10,00			
		3	Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	5.125.150	Dishub
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	100	300.000.000	Disparbud
		5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	100	159.598.000	Disdag KUKM
		6	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Persen	20,58	23,00	240.518.100	Disdag KUKM

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		7	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	0	20	3.295.953.500	Disperin TK
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	76,286	74,5	584.789.000	DPMPTSP
		2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	15.000.000	DPMPTSP
6	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
1	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	2,01	2,59	175.912.600	DLH
		2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,40	1,38	586.491.000	DLH
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	51,20	68	64.537.000	DLH
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	0	100	0	Dis PUTR
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	5	Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	894.500.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
		6	Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	Persen	1,66	1,30	3.516.725.000	DLH
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	275.000.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	11,84	10,30		

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Tabel 2.4 di atas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 76 (tujuh puluh enam) program prioritas perangkat daerah dengan 16 (enam belas) sasaran prioritas pembangunan daerah. Sedangkan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah diuraikan pada tabel 2.6 di atas.

Pernyataan pada tabel 2.4 dan tabel 2.6 di atas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 halaman 114.

Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya:

- a. Bidang Pemerintahan yakni : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
- b. Bidang Pembangunan Manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting (rembuk stunting, manajemen data stunting, reviu program kegiatan penurunan angka stunting), pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dan memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA), serta teviu terhadap capaian indikator kabupaten sehat;
- c. Bidang Perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

2) Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik

Indikator ini mengukur sejauh mana hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program, atau naskah akademik. Indikator ini menunjukkan tingkat integrasi hasil riset ke dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen strategis, tujuannya adalah 1) Memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian yang valid dan rekomendasi yang relevan, 2) Meminimalkan risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran. 3) Mendukung Peningkatan Kualitas Naskah Akademik yang kuat secara substansi dan berdasar pada riset yang komprehensif. Dampaknya Kebijakan yang Lebih Responsif/Relevan dan Akurat akan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan, mendorong sinergi dengan perguruan tinggi dan riset untuk mencegah tumpang tindih riset yang tidak terpakai atau tidak relevan, Indikator Kinerja sasaran dua didukung 1 (satu) Program, yakni Program Riset dan Inovasi Daerah.

Arah kebijakan dan pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, 2) Inovasi dan Inovasi. Beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 dalam mendukung kesempurnaan dokumen perencanaan Pembangunan daerah, diantaranya:

1. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset;
2. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
3. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
4. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi.

Tahun 2025, Bapperida Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan kelitbangan dan riset daerah, 5 (lima) diantaranya akan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik atau penyusunan Rancangan Awal (Teknokratik) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, penyusunan Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 dan penyusunan Rancangan Akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Adapun judul dari 5 kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan Ranwal tersebut yaitu:

- i. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah 2025-2029;
- ii. Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial (Amanat RPJDM);
- iii. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
- iv. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
- v. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Adapun kegiatan dan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2025 diantaranya :

- i. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2025;
- ii. Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- iii. Penginputan Indeks Inovasi Daerah;

- iv. Penyusunan Dokumen Inovasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah dan SDGs;
- v. Penyusunan Policy Brief.

3) Nilai Sakip

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan penilaian Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pengukurannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan kapabilitas kelembagaan perencana, koordinasi dan kompetensi sdm perencana.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja Nilai Sakip belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, disebabkan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2025 belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bapperida Kepulauan Selayar tahun 2025 mendapat nilai B (60).

Namun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bapperida Nomor : 700.1.2.7/086/EV-LAKIP/III/2025/ITDA tanggal 24 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 72,95 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan demikian Bapperida akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3)

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah/penyedia layanan publik. IKM digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Berdasarkan data laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeirda) Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah baik. Nilai rata-rata keseluruhan unsur layanan adalah 83,35 dalam skala 100. Namun, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu diperbaiki, yaitu waktu penyelesaian, perilaku pelaksana, serta penanganan pengaduan pengguna layanan.

Beberapa rekomendasi terhadap perbaikan diantaranya penerapan sistem pelayanan secara online, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala, serta penerapan system pengaduan secara online.

Untuk itu Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan menerapkan sistem berbasis online.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 2) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5) Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator kinerja ini mencakup beberapa elemen utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara transparan, akurat, transparans, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, dikarenakan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2025 baru disusun pada awal tahun 2026 serta pelaksanaan penilaian atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan pada awal tahun 2026.

Tabel. 2.7 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan

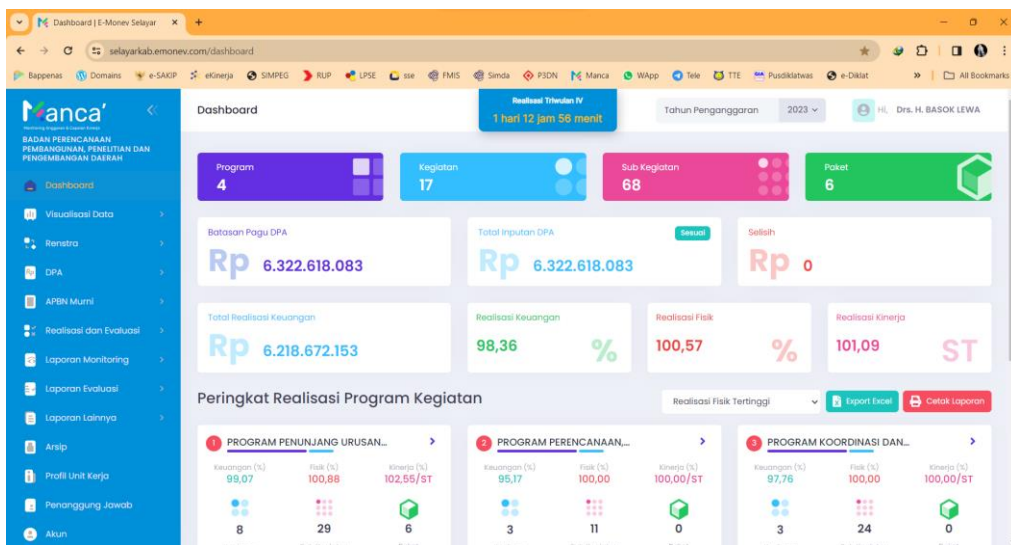
No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Perencanaan								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	890.124.700	858.387.131	31.737.569	96,43	3	100%	6	100%
2	Urusan Riset dan Inovasi								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	353.965.500	349.266.253	4.699.247	98,67	1	100%	2	100%
3	Urusan Penunjang								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.792.111.200	4.607.497.250	184.613.950	96,15	3	100%	8	100%

Sumber : RFK Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025

2.1.5. Inovasi

Perkembangan sistem informasi dan teknologi menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah, untuk itu pada tahun 2024 Bapperida Kepulauan Selayar membuat inovasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang berisi database program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi kinerja dan keuangan per tahun anggaran perencanaan, data tersebut direkap dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah menyediakan data capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dapat akses secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 2.1
Tampilan Website <https://selayarkab.emonev.com>



Manfaat integrasi dari aplikasi monitoring dan evaluasi antara lain : 1) organisasi dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, 2) Memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis, 3) Memberikan informasi dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran.

2.1.6. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2025, Bapperida Kepulauan Selayar menerima Penghargaan Top 5 Integrated Sustainability Indonesia Movement 2025 (I-SIM) dalam rangka Indonesia's SDGs Action Award 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada tanggal 17 November 2025 bertempat di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2.2. KEBIJAKAN DAERAH

Sesuai dengan kewenangannya, Bapperida telah menyusun 3 (tiga) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan yakni:

Tabel 2.8
Kebijakan Daerah yang ditetapkan Tahun 2025

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah yang diselesaikan	Ket
		Nomor, Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	Nomor 2 Tahun 2025, Tanggal 20 Agustus 2025	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan keuangan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	Perda
2	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	Nomor 18 Tahun 2025, Tanggal 7 Agustus 2025	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan	Perbup
3	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	Nomor 14 Tahun 2025, Tanggal 2 Agustus 2025	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam	Perbup

N O	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah yang diselesaikan	Ket
		Nomor, Tanggal Pengesahan	Tentang		
				Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar	

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Dalam Menyusun perencanaan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kewenangan yang dimiliki daerah, menyesuaikan dengan potensi setiap desa dan kecamatan maupun aspirasi Masyarakat	Melihat kemampuan keuangan daerah dalam menentukan program dan kegiatan prioritas	Melihat tren kemampuan keuangan daerah tahun sebelumnya untuk menentukan proyeksi kemampuan keuangan untuk satu tahun kedepannya
			Menentukan program dan kegiatan prioritas dengan mengacu dan menselaraskan pada program prioritas provinsi dan nasional
		Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas dengan aspirasi masyarakat yang diusulakn melalui Musrenbang desa / kelurahan dan kecamatan	Mengidentifikasi usulan prioritas musrenbang kecamatan untuk diselarakan dengan program prioritas daerah

BAB III
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	NIHIL				

3.2. Hambatan – Hambatan

Bapperida Kepulauan Selayar pada tahun 2025 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bapperida tahun 2025. Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi untuk dicermati, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang, sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021–2026 dapat tercapai.

Diakui bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan penunjang selama Tahun Anggaran 2025. Seluruh keberhasilan, prestasi, maupun keterlambatan dan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan tahun 2025 telah disampaikan dalam laporan ini.

Benteng, Januari 2026
KEPALA BAPPERIDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003